

TESIS

**IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL



Sebastiao de Jesus Freitas
No. Mhs. :10 105201448/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMAJAYAYOGYAKARTA
2014**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sebastiao de Jesus Freitas
Nomor
Mahasiswa : 105201448/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Rangka
Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)

Nama Pembimbing : Tanggal Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum

20-1-2014
.....

B. Bambang Riyanto, SH, M.Hum

20-1-2014
.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Sebastiao de Jesus Freitas
Nomor
Mahasiswa : 105201448/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Rangka
Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)

Nama Pembimbing :	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum. (Ketua)	20-1-2014	
B. Bambang Riyanto, SH, M.Hum. (Anggota)	20-1-2014	
Y. Hartono, SH., M.Hum. (Anggota)	20-1-2014	

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Batasan Masalah	11
3. Keaslian Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian	16
B. Tujuan Penelitian	16
C. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Izin	19
1. Pengertian Izin	19
2. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin	20

B. Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum	24
1. Pengertian	24
2. Sejarah Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum	31
C. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum..	33
1. Izin Angkutan Dalam Trayek	33
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek	40
D. Otonomi Daerah	52
1. Pengertian Otonomi Daerah	52
2. Tujuan Otonomi Daerah	55
E. Landasan Teori	56
1. Teori Kebijakan Publik.....	56
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Metode Pendekatan	72
C. Sifat Penelitian	73
D. Jenis Data	74
E. Analisa Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Karakteristik Penelitian	83
1. Profil Kabupaten Bantul	83
2. Sejarah Kabupaten Bantul	83
3. Dinas Perizinan	86
B. Pemberian Izin Pada Dinas Perizinan Kabupaten Bantul	93
1. Sistim dan Prosedur Pelayanan.....	93
2. Jenis Pelayanan Perizinan	99
3. Waktu penyelesaian dan Biaya Retribusi	104

C. Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan	
Bermotor Umum	113
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor	
Umum Dalam Trayek	113
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor	
umum Tidak Dalam Trayek	118
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pemberian	
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum	
Di Kabupaten Bantul	128
1. Aspek Teoretis	128
2. Aspek Yuridis	141
3. Aspek Pelaksanaan	175
E. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Kendala Kendala Yang Dihadapi	184
1. Aspek Teoretis.....	184
2. Aspek Yuridis.....	185
3. Aspek Pelaksanaan.....	186
BAB V PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Saran	193

Daftar Tabel

Tabel 1 Persamaan dan perberdaan dengan penelitian sebelumnya.....	12
Tabel 2 Data Personalia Dinas Perizinan Kabupaten Bantul	90
Tabel 3 Waktu Penyelesaian dan Biaya Retribusi	104
Tabel : 4 Penerima izin angkutan yang tidak menggunakan persyaratan penyelenggaraan angkutan Tahun 2011.....	119
Tabel : 5 Penerima izin angkutan yang tidak menggunakan persyaratan penyelenggaraan angkutan Tahun 2012	125
Tabel: 6 Proses kebijakan penyelenggaraan angkutan umum	129
Tabel : 7 Waktu penyelesaian dan biaya izin trayek dan izin operasi angkutan tidak dalam trayek	166
Tabel : 8 Perbandingan ukuran pemberian izin penyelenggaraan angkutan dalam Trayek antara Keputusan Menteri Perhubungan, Perda Bantul Nomor 10 Th 2005/18 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Th 2010	168

Tabel : 9 Perbandingan ukuran pemberian izin penyelenggaraan angkutan
tidak dalam trayek antara Keputusan Menteri Perhubungan, Perda
Nomor Bantul Nomor 10 Tahun 2005 diubah dengan perda Nomor 18
Th 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Th 2010..... 172

Daftar Gambar :

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perizinan..... 89
Gambar 2 Prosedur pelayanan perizinan..... 99

